



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : Suyuti Syamsul
- 2. Jabatan : KEPALA DINAS
- 3. NHK : 62676

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** 7.444.000.000

- 1. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/70 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
- 2. Tanah Seluas 322 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
- 3. Tanah Seluas 10000 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 303.000.000
- 4. Tanah Seluas 10000 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 303.000.000
- 5. Tanah Seluas 3000 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
- 6. Tanah Seluas 2620 m2 di SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 968.000.000
- 7. Tanah dan Bangunan Seluas 455 m2/200 m2 di KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 4.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** 112.450.000

- 1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
- 2. MOBIL, Toyota RUSH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
- 3. LAINNYA, Miami SEPEDA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 450.000
- 4. MOTOR, YAMAHA ALL NEW AEROX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	519.910.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	3.908.313.946
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.062.282.895
F. HARTA LAINNYA	Rp.	402.774.591
Sub Total	Rp.	16.449.731.432
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	16.449.731.432

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAINER DANNY P MAMAHIT
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 935228

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	6.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 110 Tahun 2011, HASIL SENDIRI	Rp.	6.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	119.101.857
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	139.101.857

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 139.101.857

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERY IRIAWAN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 437712

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.415.000.000
1. Tanah Seluas 1.130 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. Tanah Seluas 1.765 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000		
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	270.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	80.913.000



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 2.765.913.000

III. HUTANG

Rp. 149.800.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.616.113.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : EDDY KELANA
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 831746

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah Seluas 20.056 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	75.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 G Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	78.860.074
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	753.860.074
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	753.860.074

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LAYUMUATULU
2. Jabatan : KEPALA UPT
3. NHK : 647149

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.476.000.000**

1. Tanah Seluas 17.236 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 1.189 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI
Rp. 1.189.000.000
3. Tanah Seluas 19.890 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA
, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 5.327 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 19.950 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA
, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 940 m2/200 m2 di KAB / KOTA
KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 17.236 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 20.120 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
9. Tanah Seluas 2.013 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 682 m2/187 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 682.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 1.200 m2/200 m2 di KAB / KOTA



KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 78.272.9001. MOBIL, SUZUKI MB. PENNUMPANG/MINIBUS Tahun 2017,
HASIL SENDIRI Rp. 76.074.9002. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1990, HASIL SENDIRI
Rp. 2.198.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 131.483.183**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 4.685.756.083**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.685.756.083

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DAMAR PRAMUSINTA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 550225

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 725.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/160 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
2. Tanah Seluas 525 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 221.800.000

1. MOTOR, SUZUKI FK 110 SP KG / SPM SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
2. MOBIL, SUZUKI AVI414F DX 4X2 MT / MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1,2 E MT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 87.245.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 140.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.174.045.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.174.045.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : RIZA SYAHPUTRA
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 239376

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	375.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	116.500.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000		
2. MOBIL, DAIHATSU SIGRA 1200 CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	90.000.000
Sub Total	Rp.	584.000.000
III. HUTANG	Rp.	450.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	134.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : IDAYATI
- Jabatan** : KEPALA UPT
- NHK** : 927547

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.710.000.000
1. Tanah Seluas 4.325 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
2. Tanah Seluas 254 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	90.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	178.192.345
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.978.192.345
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.978.192.345

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ARJAN ARKASI
- Jabatan** : ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
- NHK** : 915804

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	125.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	125.000.000
1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	47.482.822
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	313.982.822
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	313.982.822

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASHHABUL KAHFI
2. Jabatan : ANALIS DATA DAN INFORMASI
3. NHK : 854201

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	34.485.215
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	434.485.215

III. HUTANG **Rp.** **165.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **269.485.215**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : NOORVELIANI ROKHAIDA
- Jabatan** : ANALIS PENYAKIT MENULAR
- NHK** : 880796

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	10.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.		
10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	109.709.266
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	119.709.266
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	119.709.266

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WINARNI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 140396

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **467.192.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 61.664.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 54.528.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 176.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **381.700.000**

1. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 345.000.000
3. MOTOR, HONDA A1F02N37M1/A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **68.850.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **245.263.011**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.163.005.011**



III. HUTANG

Rp. 60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.103.005.011

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARINI FRIANTI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
3. NHK : 882848

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.675.000.000**

1. Tanah Seluas 19.360 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 19.500 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 610 m2/36 m2 di KAB / KOTA LAMANDAU, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
4. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , Rp. 300.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/163 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **245.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **357.900.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **2.277.900.000**

III. HUTANG **Rp.** **16.840.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.261.060.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JALMIN NAKI**
2. Jabatan : **BENDAHARA**
3. NHK : **413821**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.170.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 930.000.000		
2. Tanah Seluas 11.000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
3. Tanah Seluas 26.182 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	178.500.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000		
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG KF 60 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000		
4. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS MT CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 139.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.978.694
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.380.478.694



III. HUTANG

Rp. 25.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.354.978.694

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALATRISNANI
2. Jabatan : BENDAHARA APBN
3. NHK : 437743

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 183.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
170.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 42.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 575.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 575.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EVARIRIN
2. Jabatan : BENDAHARA APBD
3. NHK : 408583

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	25.000.000
1. Tanah Seluas 630 m2 di KAB / KOTA KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	130.000.000
1. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS MT CKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	201.108.478
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	387.108.478
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	387.108.478

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NI LUH PUTU DEWI NOVILASARI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
3. NHK : 698561

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	20.000.000
1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.		
20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	1.350.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	107.855.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.479.855.000
III. HUTANG	Rp.	100.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.379.455.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AFRINA YUNITA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 753952

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah Seluas 938 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	141.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5S / MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HADIAH Rp. 11.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	561.300.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	561.300.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : EKA NOVIANTY
- Jabatan** : BENDAHARA
- NHK** : 935191

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO M3 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.725.560
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	270.725.560
III. HUTANG	Rp.	515.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-244.274.440

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INDAH WAHYUNI
2. Jabatan : PENATA KEUANGAN
3. NHK : 923479

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.397.252
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.397.252

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.397.252

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NENY NEOLOVA**
2. Jabatan : **BENDAHARA APBD**
3. NHK : **927549**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **825.000.000**

1. Tanah Seluas 149 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 307 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **154.500.000**

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **200.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **979.700.000**

III. HUTANG **Rp.** **300.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **679.700.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EMMY ROULINA SIPAYUNG
2. Jabatan : BENDAHARA APBN
3. NHK : 928523

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	70.000.000
1. MOTOR, HONDA SOLO/BEBEK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1100 G Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	42.999.744
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.012.999.744
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.012.999.744

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EKA MARETHI ARSELYANI
2. Jabatan : APOTEKER MADYA
3. NHK : 928030

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	70.000.000
1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGON R Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.341.963
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	71.341.963
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	71.341.963

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YENIE HERWES
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 966915

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	145.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	120.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.362.122
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	291.362.122

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **291.362.122**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDWARD ROY TRISUNGKONO
2. Jabatan : ANALIS KESEHATAN KERJA
3. NHK : 645847

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 160.000.000

1. Tanah Seluas 100.000 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 217.000.000

1. MOBIL, TOYOTA PENUMPANG Tahun 1994, WARISAN Rp. 20.000.000
2. MOBIL, HONDA PENUMPANG Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR MODEL SOLO ADV 150 CC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOTOR, HONDA L1K02Q33L1 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 46.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 45.315.270

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 468.815.270

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 468.815.270



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TUTI HIDAYAH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI JAMINAN KESEHATAN, MUTU DAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
3. NHK : 988440

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	370.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/72 m2 di KAB / KOTA KATINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	725.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000		
2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.950.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	156.699.882
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.283.649.882
III. HUTANG	Rp.	251.350.145
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.032.299.737

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : THYA AGUSTINA NUGRAHA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 666387

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	101.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.		
90.000.000		
2. MOTOR, HONDA NC11B3C A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.		
2.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA NEX II Tahun 2019, HADIAH Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.400.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	105.400.000
III. HUTANG	Rp.	54.289.484
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	51.110.516

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ELVIANA SATRIANI SUARDIE
- Jabatan** : PENGELOLA PROGRAM DAN PELAPORAN
- NHK** : 996931

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	91.900.000
1. MOTOR, YAMAHA CASH WHEEL Tahun 2024, HASIL SENDIRI		
Rp. 1.900.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI		
Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.443.500
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	97.343.500
III. HUTANG	Rp.	85.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.343.500

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.